

BAB II

DINAMIKA KEAMANAN MARITIM DI LAUT SULU-SULAWESI

Keamanan maritim merupakan salah satu isu utama dalam hubungan internasional, terutama di kawasan strategis seperti Laut Sulu-Sulawesi. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar sebagai jalur perdagangan utama, tetapi juga menghadapi tantangan keamanan serius akibat aktivitas pembajakan dan terorisme maritim, terutama oleh kelompok Abu Sayyaf. Sejak kemunculannya pada tahun 1990-an, kelompok ini telah memanfaatkan kondisi geografis kawasan tersebut untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk penculikan dan pembajakan kapal yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Ancaman ini mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk kerja sama trilateral melalui *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tahun 2017 sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman terhadap keamanan maritim. Prakarsa ini bertujuan untuk meningkatkan patroli gabungan, berbagi intelijen, dan memperkuat penegakan hukum di perairan strategis ini.

Bab II mengkaji dinamika keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dengan menyoroti ancaman pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf dan respon kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. *Bagian pertama* menguraikan latar belakang ancaman keamanan maritim di kawasan tersebut, termasuk sejarah kegiatan kriminal maritim yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. *Bagian kedua* membahas dasar hukum dan kebijakan kerja sama trilateral yang mendukung upaya keamanan di kawasan. *Bagian ketiga* mengkaji peran dan kontribusi masing-

masing negara dalam melaksanakan kerja sama melalui *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). *Bagian empat* mengkaji efektivitas kerja sama ini dalam mengurangi insiden pembajakan dan meningkatkan stabilitas regional. Terakhir, *bagian kelima* memberikan analisis tentang tantangan dan prospek kerja sama trilateral dalam mengatasi ancaman keamanan maritim di masa depan.

2.1 Ancaman Abu Sayyaf

Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan salah satu aktor non-negara paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan maritim, khususnya di perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Didirikan dengan latar belakang ideologis untuk mendirikan negara Islam yang merdeka, kelompok ini telah menjadi organisasi kriminal yang mengandalkan kekerasan, penculikan, dan penjarahan sebagai strategi utamanya untuk mendapatkan dana. Dengan memanfaatkan pengawasan maritim yang lemah dan situasi geopolitik yang tidak stabil, Abu Sayyaf telah menjadi simbol kompleksitas ancaman terorisme maritim modern yang melampaui batas-batas negara.

ASG didirikan pada tahun 1991 oleh Abdurajak Abubakar Janjalani, mantan anggota *Moro National Liberation Front* (MNLF) dengan tujuan mendirikan negara Islam merdeka di Mindanao, Filipina. Setelah kematian Janjalani pada tahun 1998, kepemimpinan diserahkan kepada adiknya Khadaffy Janjalani, tetapi terjadi pertikaian internal mengenai pembagian kekuasaan. Awalnya, kelompok ini menargetkan orang-orang Kristen melalui serangan granat dan penculikan, tetapi pada 1994, ASG mulai menjadikan penculikan untuk meminta tebusan sebagai sumber pendanaan utama. Seiring berjalannya waktu, Abu Sayyaf memperluas

kegiatannya hingga mencakup pembajakan kapal di perairan sekitar Filipina, sebuah strategi yang telah menjadi kelanjutan dari penculikan untuk mengumpulkan dana untuk operasi dan pembelian senjata. Meskipun sering mendapat kecaman internasional, kelompok tersebut membenarkan tindakannya sebagai bagian dari jihad yang membantu merekrut anggota baru dan mendukung gerakannya (East, 2015, p. 142).

ASG terlibat dalam berbagai kejahatan terorganisir yang menciptakan terorisme dan mengumpulkan dana melalui penculikan, pemboman, dan serangan terhadap warga sipil. Kelompok ini telah melakukan penculikan yang meluas sejak tahun 1993, termasuk penculikan Sipadan yang terkenal pada tahun 2000 dan penculikan Dos Palmas tahun 2001 yang menargetkan wisatawan asing dan lokal untuk mendapatkan tebusan. Selain itu, ASG bertanggungjawab atas beberapa pengeboman di Filipina, termasuk pengeboman Bandara Davao pada tahun 2003 dan serangan terhadap *M/V Superferry 14* pada tahun 2004 yang menewaskan banyak korban. ASG juga menyerang kota-kota dan transportasi umum, seperti Serangan Ipil pada tahun 1995 dan serangan terhadap angkutan jip yang membawa katekis Kristen pada tahun 1999. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa ASG beroperasi sebagai kelompok teroris dan kriminal yang mengandalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya (*Abu Sayyaf Kidnappings, Bombings and Other Attacks*, 2007).

ASG memanfaatkan lemahnya keamanan maritim di perairan Indonesia dan Filipina serta posisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan batas laut yang luas, sehingga menyulitkan pemantauan dan penegakan hukum. Ini

merupakan bagian dari upaya ASG untuk mendirikan kekhalifahan Islam di Asia Tenggara dengan menuntut uang tebusan besar, terutama dari warga negara Indonesia. Selain alasan keuangan, ASG juga memiliki hubungan dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang menyediakan pengaruh ideologis dan kemungkinan sumber daya untuk mendukung operasi kelompok tersebut. Ketidakstabilan di Filipina selatan akibat gerakan separatis dan kepemimpinan yang lemah semakin memungkinkan Abu Sayyaf beroperasi secara bebas. Kurangnya respon terkoordinasi dari pihak berwenang Indonesia dan ASEAN terhadap ancaman pembajakan dan terorisme juga membuat kelompok tersebut semakin berani melanjutkan aktivitasnya (Nainggolan, 2016).

ASG terdiri dari anggota yang umumnya berpendidikan rendah dan merasa didiskriminasi, banyak di antara kelompok yang bergabung karena solidaritas atau balas dendam terhadap militer. Kelompok ini tidak terorganisir dengan baik, terdiri dari beberapa sel yang beroperasi secara independen, lebih menyerupai jaringan kriminal daripada organisasi teroris yang terstruktur. Seiring berjalannya waktu, ASG telah beralih dari terorisme berbasis ideologi menjadi kelompok kriminal yang mengandalkan pembajakan untuk membiayai operasinya (*Lima Hal Tentang Kelompok Abu Sayyaf Di Filipina*, 2016). Fokus utama ASG sekarang lebih kepada keuntungan finansial daripada tujuan politik atau ideologis yang menunjukkan evolusi kelompok tersebut menjadi entitas kriminal murni. Kelompok ini juga dikenal karena kebrutalannya, termasuk penculikan, pemboman, dan pembunuhan sandera jika uang tebusan tidak dibayarkan. Transisi ini mencerminkan dinamika konflik yang kompleks di Filipina, yaitu ASG telah berkembang dari gerakan

separatis menjadi kelompok kejahatan terorganisasi (*Dari Separatis Menjadi Teroris, 4 Fakta Kelompok Abu Sayyaf*, 2018).

Secara keseluruhan, Abu Sayyaf telah berkembang dari kelompok separatis berbasis ideologis menjadi jaringan kriminal yang berfokus pada keuntungan finansial dengan pembajakan kapal sebagai salah satu taktik utamanya. Kelemahan sistem keamanan maritim dan kurangnya koordinasi lintas negara menjadi faktor yang memungkinkan kelompok ini terus beroperasi. Kehadiran dan tindakan brutal Abu Sayyaf menggarisbawahi perlunya pendekatan regional yang lebih komprehensif dan terpadu untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di Asia Tenggara.

2.2 Faktor Penyebab Tingginya Ancaman Pembajakan

Ancaman pembajakan di kawasan maritim Asia Tenggara, khususnya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Untuk memahami mengapa pembajakan tetap menjadi ancaman utama, penting untuk mengidentifikasi dan memeriksa faktor-faktor penyebab yang mencakup kondisi geografis, politik, dan ekonomi, serta lemahnya koordinasi dan penegakan hukum antarnegara di kawasan ini. Letak strategis Laut Sulu-Sulawesi yang menjadi jalur pelayaran utama di Asia Tenggara, memudahkan para pelaku kejahatan untuk bersembunyi dan melarikan diri. Keberadaan banyak pulau kecil dan selat sempit di wilayah ini memberikan keuntungan bagi kelompok pembajak untuk meluncurkan serangan, baik dalam bentuk penculikan maupun perampokan bersenjata. Ketidakjelasan batas maritim antar Indonesia, Malaysia, dan Filipina memperburuk situasi, sebab ini

menghambat penegakan hukum dan koordinasi antar aparat keamanan negara-negara tersebut (Wirawan, 2022).

Definisi pembajakan sebagaimana digunakan dalam penelitian ini mengacu pada istilah “pembajakan” secara luas yang mencakup baik pembajakan menurut Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) maupun perampokan bersenjata menurut Resolusi Majelis IMO A.1025 karena keduanya dianggap mengancam keamanan maritim dan memiliki pola tindakan yang serupa, yaitu sama-sama melibatkan tindakan kekerasan atau perampasan secara ilegal di laut untuk tujuan pribadi dengan kedua bentuk kejahatan tersebut menimbulkan ancaman serupa terhadap keselamatan kapal, awak, dan stabilitas keamanan maritim kawasan (Ocean and Law of the Sea, 1982, pp. 60–61; (IMO, 2010, p. 4).

Sementara itu, ReCAAP dan UNCLOS membedakan definisi pembajakan sebagai tindakan kekerasan atau penahanan ilegal yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal atau pesawat pribadi di laut lepas atau wilayah di luar yurisdiksi negara mana pun, sedangkan perampokan bersenjata merupakan tindakan serupa yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara, seperti laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan internal (ReCAAP ISC, n.d.; Ocean and Law of the Sea, 1982, pp. 60–61). Dalam konteks penelitian ini, pembajakan tidak hanya dimaknai secara hukum formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk serangan bersenjata seperti Abu Sayyaf. Oleh karena itu, pembajakan dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa elemen yang dapat diukur, yaitu:

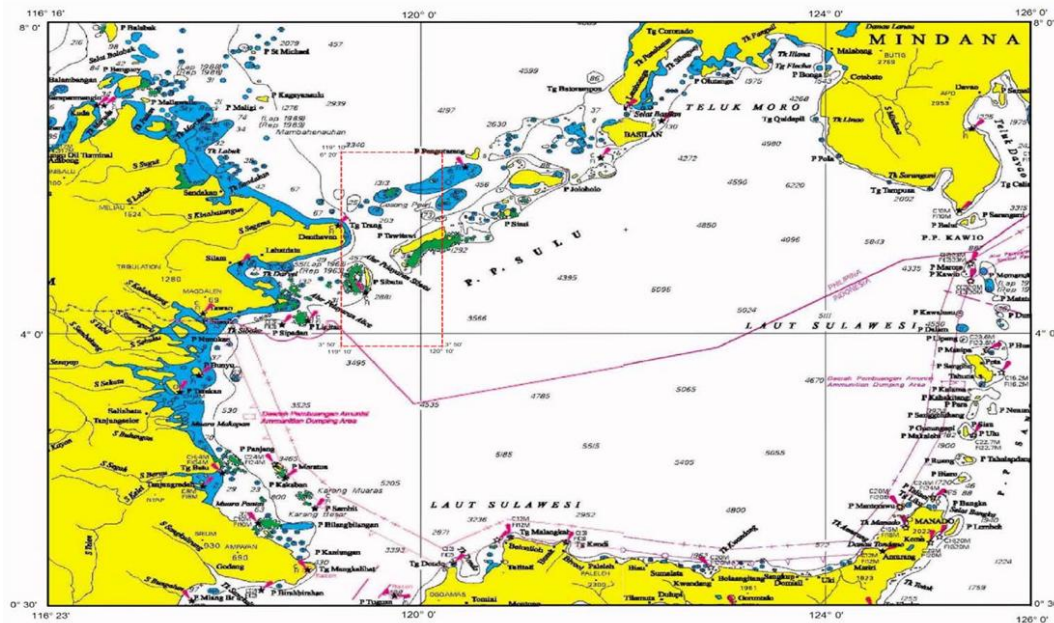
1. Penculikan, merupakan tindakan penahanan atau penyanderaan awak kapal atau penumpang oleh pelaku untuk tujuan memperoleh uang tebusan atau tekanan politik;
2. Pengeboman, mengacu pada penggunaan bahan peledak atau serangan eksplosif terhadap kapal atau fasilitas maritim yang menimbulkan kerusakan fisik maupun korban jiwa; serta
3. Serangan, meliputi segala bentuk tindakan kekerasan fisik, baik bersenjata maupun tidak yang dilakukan terhadap kapal, awak, atau properti di atas kapal yang bertujuan untuk perampokan, sabotase, atau intimidasi.

Menggabungkan elemen-elemen ini, penelitian melihat pembajakan sebagai bentuk kejahatan maritim yang kompleks yang membutuhkan respons kolektif dan terkoordinasi antarnegara.

Tingginya ancaman pembajakan ASG di Laut Sulu-Sulawesi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain letak geografisnya yang strategis sebagai jalur laut utama dan lemahnya pengamanan di perairan tersebut akibat minimnya patroli dan koordinasi antarnegara. Kelompok ini memanfaatkan ketidakstabilan politik di Filipina selatan dan lemahnya pengawasan pemerintah untuk melakukan penculikan dan kejahatan maritim lainnya (BBC News Indonesia, 2017). Motivasi ekonomi juga menjadi faktor utama dengan tuntutan tebusan dari korban penculikan menjadi sumber dana ASG, terutama di tengah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, sejarah konflik yang berlangsung lama dan kurangnya kerja sama internasional yang efektif semakin mempersulit upaya pemberantasan pembajakan. Tantangan lain seperti ancaman keamanan non-

tradisional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba, semakin memperburuk situasi dan memberi ruang bagi ASG untuk terus beroperasi (Khasanah et al., 2021).

Gambar 2. 1 Daerah yang Rentan Pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi



(Chandra & Yudha, n.d.)

Perairan Sulu-Sulawesi dikenal sebagai salah satu wilayah maritim paling rentan di Asia Tenggara dengan kepentingan strategis yang signifikan karena lokasinya di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wilayahnya meliputi sekitar 900.000 km² dan banyak dilalui dengan sekitar 3.900 kapal setiap tahun. Perairan ini dikenal sebagai jalur pelayaran paling berbahaya kedua setelah Selat Malaka. Ancaman utama bagi wilayah ini adalah pembajakan yang terus menerus meningkat. Misalnya antara bulan Maret dan Juni 2016, terjadi serangkaian pembajakan yang melibatkan kapal berbendera Indonesia di perairan Sulu-Sulawesi. Insiden pertama terjadi pada tanggal 25 Maret 2016 yang menargetkan

kapal tunda TB Brahma 12 dan tongkang BG Anand 12, ketika sepuluh anak buah kapal Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, sebuah organisasi militan terkenal. Selain membahayakan keselamatan awak kapal, pembajakan juga mengganggu perdagangan maritim dan memperburuk tantangan keamanan dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan senjata (Irantung, 2021).

Wilayah ini memiliki sejarah panjang pembajakan laut yang dimulai sejak masa pra-kolonial, menciptakan lingkungan saat praktik tersebut terus berkembang. Kesenjangan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja di masyarakat pesisir telah menyebabkan beberapa orang beralih ke pembajakan sebagai sumber pendapatan, sementara kelompok seperti Abu Sayyaf telah memanfaatkan situasi ini untuk menjalankan operasi kriminalnya. Kehadiran organisasi teroris di sepanjang perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina memperburuk tantangan keamanan dan mempersulit penegakan hukum. Meskipun ada tindakan pengamatan ketat, ancaman pembajakan tetap ada karena kelompok kriminal terus mencari peluang menguntungkan melalui penculikan dan pemerasan (Amling et al., 2019, pp. 12–17).

ASG menggunakan berbagai taktik dalam melakukan pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi yang salah satu strategi utamanya adalah penculikan untuk meminta tebusan yang menargetkan individu-individu kaya dan warga negara asing untuk mengumpulkan dana bagi operasinya. ASG memilih target yang tidak bersenjata dengan potensi tebusan yang tinggi, menjadikan penculikan sebagai sumber pendapatan utama. Kelompok ini juga menggunakan pengetahuan lokal yang

mendalam tentang perairan untuk merencanakan serangan dan menghindari pihak berwenang. Kelompok ini juga bekerja sama dengan jaringan kriminal lain untuk memperluas cakupan operasinya dan mengeksploitasi ketidakstabilan politik dan sosial di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, ASG telah berkembang dari kelompok ideologis menjadi organisasi yang lebih berfokus pada keuntungan melalui kegiatan kriminal seperti pembajakan (East, 2016, p. 4).

Pembajakan yang dilakukan ASG menimbulkan ancaman serius bagi keamanan kawasan di Asia Tenggara, khususnya di Laut Sulu-Sulawesi. Aktivitas ASG tidak hanya mengganggu stabilitas lokal, tetapi juga berdampak luas pada perdamaian global dan perdagangan di kawasan tersebut. Keterlibatan ASG dalam terorisme dan penculikan untuk tebusan menunjukkan perlunya kerja sama yang erat antara negara-negara dalam mengatasi ancaman ini. Namun, prinsip non-intervensi di ASEAN kerap kali menjadi kendala dalam menciptakan respon yang lebih terpadu terhadap ancaman terorisme dan pembajakan. Oleh karena itu, tindakan kolektif yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan keamanan maritim dan memastikan bahwa kawasan tersebut tetap tangguh dari ancaman kelompok Abu Sayyaf (Adi Lesmana et al., 2017).

Tantangan ini semakin rumit dengan minimnya patroli laut dan koordinasi intelijen antarnegara yang membuat ASG dapat beroperasi dengan relatif bebas. ASG memanfaatkan ketidakstabilan sosial dan politik di kawasan tersebut, serta kurangnya penegakan hukum maritim, untuk melancarkan aksi penculikan untuk tebusan yang menjadi sumber utama pendanaan bagi kelompok tersebut. Di sisi lain, ancaman keamanan non-tradisional seperti perdagangan manusia dan

penyelundupan narkoba juga memberikan ruang bagi kelompok militan untuk melanjutkan operasi kriminalnya. Dalam kerangka ini, pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi bukan hanya sekadar kejahatan maritim, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang saling memengaruhi (Khasanah et al., 2021).

Menanggapi ancaman ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah bekerja sama untuk melawan ancaman pembajakan ASG di Laut Sulu-Sulawesi. Salah satu upaya utama adalah penandatanganan *Framework of Arrangement* (FOA) yang mengatur prosedur operasi standar dalam menjaga keamanan maritim dan mengatasi ancaman di kawasan. Ketiga negara juga telah membentuk patroli maritim terkoordinasi sejak 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan respon cepat terhadap aktivitas pembajakan. *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) ini bertujuan untuk menutup celah keamanan yang sebelumnya dieksploitasi oleh ASG, seperti patroli yang lemah dan koordinasi minimal antar negara. Melalui pelatihan militer bersama dan berbagi intelijen, ketiga negara dapat menanggapi ancaman pembajakan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga mengurangi keberhasilan penculikan untuk mendapatkan tebusan yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama kelompok tersebut. Selain itu, TCA juga memperketat pengawasan di jalur perairan yang kerap digunakan ASG untuk menyerang kapal dan melarikan diri menggunakan *speedboat*. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menekan aktivitas kelompok militan dan menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman untuk perdagangan dan navigasi (Rahman, 2019).

2.3 Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Laut Sulu-Sulawesi



(Britannica, 2025)

Laut Sulu dan Laut Sulawesi adalah dua perairan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat dan memiliki figur geografis yang terkait. Laut Sulawesi yang juga dikenal sebagai *Celebes Sea*, dikelilingi oleh Kepulauan Sulu di Utara, Pulau Mindanao di barat, dan Pulau Sulawesi di selatan. Laut dengan kedalaman maksimal mencapai 6.200 m dan luas permukaan sekitar 280.000 km² ini memiliki bentuk basin yang dalam dan kompleks, serta arus laut yang kuat. Laut Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia dengan lebih dari 580 spesies karang ditemukan di terumbu karangnya (Britannica, 2025a). Sementara itu, Laut Sulu terletak di barat daya Filipina dan dipisahkan dari Laut Cina Selatan oleh Pulau Palawan dengan luas sekitar 260.000 km². Laut ini merupakan lokasi penting bagi konservasi laut, termasuk Taman Laut Nasional Terumbu Karang Tubbataha, sebuah situs warisan dunia (Britannica, 2025b). Selain

itu, kedua perairan ini memainkan peran strategis dalam perdagangan internasional sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia dengan Pasifik. Batas antara kedua laut tersebut ditandai oleh patahan Sibutu-Basilan yang menunjukkan hubungan geologis dan oseanografis antara keduanya.

Bentang Laut Sulu-Sulawesi merupakan jantung Segitiga Terumbu Karang dunia, rumah bagi beragam kehidupan laut penting di seluruh dunia. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi spesies ikonik seperti penyu hijau dan hiu paus yang terancam punah akibat aktivitas manusia. Konservasi di wilayah ini sangat penting tidak hanya untuk melindungi spesies ini, tetapi juga untuk menjaga ekosistem laut secara keseluruhan, termasuk hutan bakau dan terumbu karang. Upaya konservasi melibatkan berbagai metode, termasuk melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan lokakarya, serta menerapkan peraturan dan pemantauan untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak (Ambari, 2018).

Gambar 2. 3 Peta Wilayah ALKI



(Arsana, 2015)

Secara ekonomi, Laut Sulu-Sulawesi memainkan peran penting sebagai jalur pelayaran dalam perdagangan global. Lebih dari 100.000 kapal melewati laut ini setiap tahun, membawa sekitar 55 juta metrik ton kargo, termasuk batu bara dan barang-barang lainnya ke negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Laut ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang menghubungkan Asia Timur dengan Pasifik, sehingga semakin meningkat nilai strategisnya, terutama untuk kegiatan ekspor/impor dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Vindia, 2024). Wilayah ALKI II melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok (Indonesia Global Maritime Forum, 2021). Nilai kargo yang melewati Laut Sulu-Sulawesi diperkirakan sekitar US\$40 miliar setiap tahunnya, termasuk ekspor batu bara Indonesia ke Filipina yang bernilai ratusan juta dolar. Ini menjadi bukti bahwa stabilitas dan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi sangat penting bagi kelancaran arus perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi regional (Vindia, 2024).

Tabel 2. 1 Nilai Barang Perdagangan Barter Tahun 2019

Barang		Volume (2 kali/bulan)	Harga Beli (per pcs)	Harga Jual (per pcs)	Total Keuntungan
	Gaun panjang	60-100 pcs/bulan	Rp 125.000-276.000	Rp 230.000-432.000	Rp 6.302.000-15.539.000

Barang		Volume (2 kali/bulan)	Harga Beli (per pcs)	Harga Jual (per pcs)	Total Keuntungan
Pakaian	Pakaian Tausug	300 pcs/bulan	Rp 288.000	Rp 374.000	Rp 25.898.000
	Sari/Saree	100 pcs/bulan	Rp 863.000	Rp 1.007.000	Rp 14.388.000
Komoditas primer	Beras (25 kg/karung)	10.000-18.000 karung/bulan	Rp 144.000-173.000	Rp 216.000-230.000	Rp 30.000.000-54.000.000
	Gula (50 kg/karung)	10.000 karung/bulan	Rp 288.000-432.000	Rp 647.000	Rp 112.500.000-187.500.000
	Minyak kelapa	2.000 kotak/bulan	Rp 210.000	Rp 259.000	Rp 5.100.000
	Mie (Maggi kari)	2.500-5.000 kotak/bulan	Rp 206.000-216.000	Rp 230.000 – 244.500	Rp 3.187.000-7.500.000

Barang		Volume (2 kali/bulan)	Harga Beli (per pcs)	Harga Jual (per pcs)	Total Keuntungan
Makanan	Barang kaleng	500-1.000 pcs/bulan	Rp 14.000	Rp 19.000	Rp 112.500.000-225.000.000
	Minuman cokelat	245 kaleng/bulan	Rp 70.000	Rp 76.000	Rp 73.500.000
Barang rumah tangga	Sabun mandi	500 pcs/bulan	Rp 20.000	Rp 29.000	Rp 225.000.000
	Rokok	2.000-5.000 kotak/bulan	Rp 2.820.000	Rp 3.597.000	Rp 81.000.000-203.000.000

Diolah oleh penulis dari (The Asia Foundation, 2019, p. 14)

Di sisi lain, perdagangan barter di Laut Sulu telah lama menjadi simbol ekonomi yang mencerminkan warisan sejarah, budaya, dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Barang dagang barter mempunyai nilai yang signifikan dalam ekonomi informal, terutama di daerah Kepulauan Sulu yang berfungsi sebagai komoditas penting untuk kehidupan sehari-hari. Barang-barang seperti bahan makanan, bahan bakar, dan minyak goreng sering kali ditukar, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan tanpa bergantung pada transaksi tunai. Di luar fungsi ekonominya, barang-barang ini juga memiliki makna budaya

karena perdagangan barter mencerminkan tradisi yang telah lama ada dan memperkuat ikatan sosial di antara para pedagang. Pada akhirnya, nilai barang dalam perdagangan barter melampaui nilai ekonomi, memainkan peran penting dalam menopang kehidupan, menumbuhkan identitas budaya, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di daerah terpencil (The Asia Foundation, 2019, pp. 6–12).

Praktik perdagangan barter telah berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum terbentuknya negara modern dan batas-batas hukum, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan di wilayah tersebut. Selain berfungsi sebagai sarana utama memenuhi kebutuhan masyarakat, perdagangan barter juga memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan di antara para pedagang, sehingga menjamin keberlanjutan sistem ini. Namun, meskipun penting, perdagangan barter sering kali beroperasi di wilayah abu-abu secara hukum yang menimbulkan tantangan regulasi dan perpajakan sekaligus menawarkan fleksibilitas bagi ekonomi lokal. Pada akhirnya, nilai barang dalam perdagangan barter melampaui nilai ekonomi, memainkan peran penting dalam menopang kehidupan, menumbuhkan identitas budaya, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di daerah terpencil (The Asia Foundation, 2019, p. 21).

Laut Sulu-Sulawesi, juga dikenal sebagai *Tri-Border Area* (TBA), terletak di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wilayah ini dianggap sebagai pusat perdagangan dan jalur komunikasi maritim, tetapi juga merupakan tempat berkembangnya terorisme dan kejahatan internasional. Ciri utama TBA adalah konflik yang sedang berlangsung antara pemerintah dan kelompok-kelompok seperti *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation*

Front (MILF), serta aktivitas teroris kelompok ekstremis seperti Abu Sayyaf. Selain itu, wilayah ini merupakan rute transit untuk perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan pembebasan sandera. Sengketa atas wilayah maritim teritorial dan yurisdiksi nasional antara negara-negara pantai juga menjadi ciri khas kawasan ini, seperti sengketa atas wilayah Laut Ambalat (Wada, 2012).

Secara historis, wilayah ini telah menjadi rumah bagi “Moro,” masyarakat Muslim di Filipina selatan yang sering digambarkan sebagai daerah yang rawan pembajakan setidaknya sejak awal abad ke-19. Perairan Laut Sulu-Sulawesi telah menyaksikan banyak insiden pembajakan, khususnya antara tahun 1993 dan 2004 dengan lebih dari 1.300 kasus pembajakan terhadap kapal-kapal di Filipina selatan saja yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan ketakutan di antara penduduk pesisir. Pemerintah kolonial Inggris yang khawatir tentang keamanan perdagangan bebas di wilayah tersebut, berjuang untuk menjaga ketertiban terhadap para perompak Sulu-Sulawesi yang bersenjata lengkap selama akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Masalah yang terus berlanjut ini berakar dalam ekonomi politik dan praktik perdagangan historis negara-negara yang terlibat dengan pembajakan yang terus berlanjut sebagai mata pencaharian yang sah di antara kelompok etnis tertentu (Amirell, 2020, pp. 222–231).

Wilayah Sulu-Sulawesi sangat rentan terhadap pembajakan karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, lokasi geografisnya berfungsi sebagai persimpangan penting untuk berbagai aktivitas lintas batas, termasuk penangkapan ikan, penyelundupan, dan pembajakan yang menjadikan titik rawan bagi aktivitas maritim ilegal. Secara historis, Sulu-Sulawesi telah menjadi pusat perdagangan

yang signifikan dengan jaringan yang luas yang dibangun untuk pertukaran produk laut yang berharga yang terus menarik operasi ilegal. Adanya batas negara yang keropos memperburuk situasi, karena kesenjangan ekonomi antara wilayah tetangga memungkinkan penyelundup dan bajak laut untuk mengeksploitasi celah ini untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi setempat, dikombinasikan dengan penegakan keamanan maritim yang tidak memadai oleh otoritas nasional, menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembajakan berkembang pesat (Tokoro, 2020, pp. 271–284).

Tantangan keamanan besar yang dihadapi oleh Laut Sulu-Sulawesi memerlukan adanya kerja sama regional antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pembajakan dan penculikan, terutama sejak 2016, menimbulkan ancaman terorisme, seperti yang terlihat dalam serangan di Kota Marawi (Pradityo, 2024). Serangan Kota Marawi pada bulan Mei 2017 merupakan konflik bersenjata besar antara militer Filipina dan kelompok militan Maute serta Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS yang dimulai ketika pemerintah berupaya menangkap pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon. Para militan mengambil alih kota, mengibarkan bendera ISIS, membakar properti publik, menyandera warga sipil, dan menciptakan medan pertempuran perkotaan yang kompleks. Konflik selama lima bulan ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, serta menjadi pengingat akan ancaman terorisme transnasional dan pentingnya kerja sama keamanan regional (*Pelajaran Dari Marawi*, 2020).

Kejahatan transnasional, termasuk penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, semakin melemahkan kawasan, sementara degradasi lingkungan mengancam

keanekaragaman hayati laut dan ekonomi lokal. Memastikan keamanan transportasi laut dan melindungi infrastruktur utama seperti pelabuhan dan jalur laut sangat penting untuk perdagangan dan stabilitas regional. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya terkoordinasi untuk meningkatkan pemantauan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan (Pradityo, 2024).

2.4 Interdependensi Kompleks dalam Keamanan

Interdependensi kompleks adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang kontras dengan realisme tradisional dengan menekankan berbagai saluran interaksi, agenda isu non-hierarkis, dan penggunaan kekuatan militer yang terbatas. Masyarakat saling terhubung melalui hubungan antarnegara, lintas pemerintah, dan lintas negara yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah seperti perusahaan multinasional. Tidak seperti pandangan realis, agenda internasional di bawah interdependensi kompleks tidak didominasi oleh kepentingan militer, sebab isu ekonomi dan ekologi mungkin lebih diutamakan tergantung pada konteksnya. Selain itu, kekuatan militer pada umumnya tidak digunakan dalam perselisihan dalam kerangka ini, meskipun mungkin masih relevan dalam interaksi dengan negara eksternal atau pada isu-isu tertentu. Model ini menyoroti sifat hubungan global yang terus berkembang, yaitu kerja sama dan ikatan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk hasil (Keohane & Nye, 2011a, pp. 20–21).

Munculnya interdependensi kompleks menimbulkan implikasi yang signifikan, membentuk kembali proses politik dan menantang asumsi realis tradisional. Ketika peran kekuatan militer menurun, negara-negara merasa sulit

mengoordinasikan isu-isu untuk negosiasi diplomatik yang mengakibatkan situasi negosiasi yang lebih rumit. Organisasi internasional memainkan peran kunci dalam membangun koalisi, khususnya di antara negara-negara kurang berkembang, sedangkan kerja sama asimetris memungkinkan negara-negara lemah memanfaatkan isu-isu tertentu untuk meningkatkan daya tawar. Hasil politik bervariasi di berbagai bidang isu, mencerminkan kompleksitas kolaborasi dan perubahan pentingnya berbagai topik. Pada akhirnya, kerangka kerja ini menantang perspektif realis, menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamika global (Keohane & Nye, 2011a, pp. 24–30).

Keamanan dalam interdependensi kompleks menawarkan perspektif yang berbeda dari pandangan tradisional yang berfokus pada aspek militer. Dalam model ini, keamanan nasional dan retorika kerja sama hidup berdampingan, menciptakan lanskap ketegangan karena negara-negara harus menavigasi kepentingan yang bersaing tanpa panduan kebijakan yang jelas. Karakteristik utama interdependensi kompleks meliputi fleksibilitas tujuan negara, luasnya jalur hubungan antarmasyarakat, dan terbatasnya peran kekuatan militer dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi. Tidak seperti pendekatan realis yang menempatkan keamanan militer sebagai prioritas utama, model ini menekankan pengelolaan hubungan ekonomi dan politik tanpa bergantung pada kekuatan militer. Implikasi teoritisnya menunjukkan bahwa keamanan dalam sistem internasional semakin ditentukan oleh dinamika kerja sama yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Keohane & Nye, 2011a, pp. 21–25).

Interdependensi kompleks dalam keamanan, khususnya keamanan maritim dibentuk oleh dinamika regional, distribusi kekuatan, dan kerja sama antar negara. analisis keamanan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti batas geografis, struktur anarkis tanpa otoritas pusat, distribusi atau polaritas kekuasaan, dan struktur sosial yang membentuk kebijakan keamanan negara. interaksi faktor-faktor ini menciptakan pola permusuhan dan persahabatan, seperti respon negara terhadap ancaman pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi akibat kelompok teroris yang mendorong peningkatan kerja sama di bidang keamanan maritim (Saputro et al., 2024). Pengaruh Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga memainkan peran penting dalam membentuk strategi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yang tercermin dalam inisiatif seperti *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Memahami sinergi ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan keamanan regional yang muncul.

Interdependensi kompleks digunakan untuk melihat bagaimana negara menanggapi ancaman maritim melalui berbagai saluran hubungan yang melibatkan aktor negara dan aktor non-negara. Konsep *multiple channels* mengacu pada beberapa jalur atau metode pendistribusian informasi atau layanan untuk memastikan rantai pasokan lancar, bahkan jika salah satu saluran terganggu. Hal ini memungkinkan kerja sama tidak hanya antara pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi organisasi internasional, perusahaan maritim, dan LSM yang terlibat dalam keamanan maritim. Selain itu, isu maritim mencerminkan karakteristik berbagai isu, ketika ancaman seperti pembajakan, pencemaran lingkungan, dan persaingan ekonomi saling tumpang tindih tanpa hierarki yang tetap. Negara-negara

tidak hanya berfokus pada aspek keamanan militer, tetapi juga mempertimbangkan kerja sama ekonomi dan diplomasi dalam menghadapi ancaman ini (Haristanto & Putranti, 2019).

Sejalan dengan konsep *minimal military engagement* dalam interdependensi kompleks, negara-negara mengutamakan diplomasi dan mekanisme hukum dalam mengelola ancaman maritim. *Minimal military engagement* dalam hal ini mengacu pada keterlibatan militer terbatas dalam operasi yang dapat ditangani oleh entitas sipil dengan menekankan solusi diplomatik dan ekonomi untuk menjaga keamanan tanpa bergantung pada kekuatan militer. Kerja sama regional, seperti melalui ASEAN, diutamakan daripada konfrontasi militer langsung yang mencerminkan dinamika kekuatan yang bergeser dari jalur militer ke jalur ekonomi dan regulasi. Ada pula ketergantungan pada perdagangan maritim global mendorong negara-negara untuk mengutamakan stabilitas daripada meningkatkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang saling terhubung, kebijakan maritim lebih dipengaruhi oleh kerja sama transnasional daripada strategi keamanan tradisional (Haristanto & Putranti, 2019).

2.5 Efektivitas – Institusional

Institusional untuk kerja sama regional merujuk pada organisasi atau forum formal yang dikembangkan oleh negara-negara di suatu kawasan untuk memfasilitasi kerja sama dan interaksi yang terstruktur. Organisasi-organisasi tersebut, seperti ASEAN, Uni Eropa, dan IORA memiliki mekanisme dan aturan yang mengatur kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Institusi regional berfungsi sebagai forum diskusi, payung kerja

sama, dan alat untuk mengembangkan tujuan bersama dan mengatasi masalah regional. Selain itu, institusi-institusi ini juga menjembatani kerja sama antarwilayah untuk membahas isu-isu yang berimplikasi lebih luas (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023). Dalam hal ini, institusi memainkan peran penting dalam kerja sama regional dengan memfasilitasi komunikasi, menetapkan standar, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik, dan mendorong integrasi ekonomi serta keamanan kolektif di antara negara-negara anggota. Sebagai penyedia platform untuk dialog dan standar yang mengatur perilaku anggota, institusi membantu membangun kepercayaan dan memastikan stabilitas dan kerja sama yang berkelanjutan. Selain itu, kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan kebutuhan regional memungkinkan institusi untuk secara efektif menanggapi tantangan spesifik, menciptakan lingkungan kerja sama yang lebih stabil dan harmonis (Mulyana & Handayani, 2015).

Suatu institusi dapat dikatakan efektif apabila mampu memadukan strategi yang jelas, struktur yang mendukung, serta sistem yang efisien dalam operasionalnya. Nilai-nilai bersama yang kuat, kepemimpinan visioner, dan staf yang berkualifikasi berperan dalam menciptakan lingkungan produktif yang selaras dengan misi lembaga. Selain itu, pengembangan keterampilan yang berkelanjutan bagi staf dan mahasiswa memastikan bahwa institusi tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan. Kombinasi unsur-unsur ini memungkinkan lembaga menjalankan fungsinya secara efisien dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang dilayaninya. Maka, efektivitas kelembagaan bergantung pada

sinergi antara strategi, struktur, sistem, budaya kerja, dan pengembangan sumber daya manusia (Chamidi, 2022).

Pengaruh institusi terhadap kerja sama regional dalam penelitian ini terbukti dari bagaimana organisasi seperti ASEAN, UNCLOS 1982, dan ReCAAP berperan dalam membentuk konvergensi kebijakan di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah, memfasilitasi kerja sama melalui mekanisme hukum dan perjanjian, meskipun prinsip non-intervensinya dapat membatasi efektivitas pengambilan keputusan kolektif. UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum untuk yurisdiksi maritim yang menjadi dasar untuk menanggapi kejahatan seperti pembajakan, sementara ReCAAP mendukung pembagian intelijen dan koordinasi keamanan untuk meningkatkan stabilitas maritim regional. Studi kasus seperti kerja sama keamanan maritim dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) menunjukkan bagaimana kombinasi mekanisme kelembagaan dapat meningkatkan kepatuhan negara terhadap kebijakan regional (Malinda Azalia, 2017). Ini menunjukkan peran lembaga kerja sama regional sangat penting dalam menciptakan kebijakan maritim yang lebih selaras dan efektif dalam mengatasi tantangan keamanan bersama.

2.5.1 ASEAN

Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1967 untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya antar negara-negara di Asia Tenggara. Awalnya terdiri dari lima negara, ASEAN kini mencakup seluruh kawasan dan berperan dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Organisasi

ini beroperasi melalui rapat dan konferensi, meskipun pendekatan berbasis konsensus terkadang menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Meskipun menghadapi tantangan terhadap efektivitas kelembagaan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Peran kelembagaan ASEAN meliputi koordinasi antar negara anggota, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan keterlibatan dengan entitas eksternal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan seperti struktur pengambilan keputusan yang terfragmentasi, koordinasi yang tidak efektif antara badan-badan ASEAN, dan terbatasnya sumber daya dan infrastruktur Sekretariat ASEAN tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, restrukturisasi kelembagaan dan tinjauan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas ASEAN dalam menjalankan fungsinya (Bandoro, 1987).

ASEAN merespon ancaman terhadap keamanan maritim terkait pembajakan melalui pendekatan multi-segi yang melibatkan kerja sama regional dan mekanisme kontra-terorisme seperti *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) dan *Southeast Asian Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT). ACCT berperan dalam membangun kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam pembagian intelijen, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik guna memerangi terorisme secara efektif. Sementara itu, SEARCCT berfokus pada pengembangan kapasitas dengan memberikan pelatihan, berbagi informasi, dan melakukan penelitian strategis untuk memahami dan menanggapi ancaman dengan tepat. ASEAN juga memperkuat patroli maritim bersama, menyelaraskan kebijakan anti terorisme, dan menangani akar ekstremisme melalui

pembangunan sosial ekonomi di daerah yang terkena dampak. Melalui pendekatan ini, ASEAN bertujuan untuk menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi kawasan tersebut (Nugraha et al., 2024).

Lebih jauh lagi, melalui forum-forum seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *ASEAN Defence Ministers Meeting Plus* (ADMM+), ASEAN berupaya menciptakan lingkungan keamanan kolektif melalui pertukaran perspektif strategis, latihan bersama, dan koordinasi penegakan hukum maritim (ASEAN, 2008; DigiGround Stuff, 2013). *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *ASEAN Maritime Outlook* juga memperkuat kerangka kerja sama dalam isu-isu maritim seperti keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan anti pembajakan (Jenny Latusia, 2021). Meskipun langkah-langkah ASEAN lebih bersifat fasilitatif dan tidak langsung seperti kerja sama operasional dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), inisiatif regional ini memberikan dasar normatif, kebijakan, dan kepercayaan yang menjadi pondasi penting bagi kolaborasi lebih berfokus antarnegara anggota (Fajriah & Latifah, 2018).

2.5.2 UNCLOS 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) merupakan kerangka hukum internasional yang mengatur berbagai aspek hukum maritim, termasuk hak navigasi kapal di perairan internasional, penyelesaian sengketa, dan pengaturan penelitian ilmiah di laut. Konvensi ini menggantikan hukum adat sebelumnya dengan standar yang lebih jelas dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga seperti (*International Tribunal for the Law of the Sea*) ITLOS dan (*International Court of*

Justice) ICJ. Selain itu, UNCLOS 1982 berperan dalam memastikan navigasi yang aman, perlindungan lingkungan laut, dan kepatuhan negara terhadap hukum maritim internasional. UNCLOS 1982 membantu mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim yang ditimbulkan oleh pembajakan oleh kelompok teroris dengan menetapkan kerangka hukum yang mendorong kerja sama internasional, termasuk pembagian intelijen, patroli bersama, dan penegakan hukum maritim. Konvensi ini juga memperjelas yurisdiksi negara pantai atas perairannya dan mengharuskan negara untuk mencegah dan menekan pembajakan melalui tindakan hukum yang kuat. Melalui definisi pembajakan secara jelas dan menetapkan mekanisme kerja sama internasional, UNCLOS 1982 memperkuat keamanan maritim dan melindungi jalur pelayaran dari ancaman kriminal transnasional (Yuliantiningsih et al., 2022, p. 58).

UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menangani pembajakan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok teroris dengan menetapkan definisi yang jelas dalam Pasal 101 mengenai tindakan kekerasan, penahanan atau kerusakan di laut lepas untuk tujuan pribadi. Konvensi tersebut juga mencakup pasal 102 yang memastikan bahwa pembajakan kapal pemerintah atau kapal perang yang awaknya memberontak tetap merupakan tindak pidana. Selain itu, Pasal 105 memperbolehkan kapal perang untuk mencegat kapal perompak dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai, sehubungan dengan upaya menghadapi kelompok teroris yang menyembunyikan kegiatan. Pasal 110 selanjutnya memberi wewenang kepada kapal perang untuk mengunjungi dan memeriksa kapal asing dalam keadaan tertentu, untuk mencegah tindakan pembajakan dan ancaman teroris

di laut lepas. Berdasarkan ketentuan tersebut, UNCLOS 1982 memberikan pedoman yang komprehensif untuk mendukung penegakan hukum internasional dalam menanggapi ancaman pembajakan dan menjaga keamanan maritim (Ocean and Law of the Sea, 1982, pp. 60–63).

2.5.3 ReCAAP

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) adalah perjanjian kerja sama regional yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim dengan mencegah dan memerangi pembajakan terhadap kapal-kapal di Asia. Melalui *Information Sharing Center* (ICS), ReCAAP mengumpulkan dan menganalisis data insiden, mengeluarkan peringatan, dan memberikan panduan kepada perusahaan pelayaran untuk meningkatkan keselamatan di perairan berisiko tinggi. Kerja sama negara-negara anggota dalam ReCAAP memainkan peran penting dalam menjaga jalur pelayaran internasional yang strategis dan mengurangi ancaman maritim di kawasan Asia (ISC, 2019, pp. 2–4). ReCAAP meningkatkan keselamatan maritim dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang insiden pembajakan yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola kejahatan di perairan berisiko tinggi. Berdasarkan analisis ini, ReCAAP mengeluarkan peringatan dan memberikan panduan kepada perusahaan pelayaran tentang tindakan pencegahan dan praktik terbaik untuk menanggapi potensi ancaman. Selain itu, ReCAAP bekerja sama dengan badan maritim internasional untuk menyebarkan informasi, mendukung pelaut yang terkena dampak, dan memastikan respon keamanan yang lebih terkoordinasi di kawasan Asia (ISC, 2022, pp. 38–41).

ReCAAP berperan dalam menanggapi pembajakan Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi dengan mengumpulkan dan menganalisis data insiden pembajakan untuk mengidentifikasi tren dan menerbitkan laporan berkala yang memberikan gambaran umum situasi keamanan maritim. Melalui peringatan dini dan rekomendasi tindakan, ReCAAP membantu kapal laut yang melintasi wilayah berisiko tinggi dengan memberi saran tentang tindakan anti pembajakan dan rute pelayaran alternatif. ReCAAP juga memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama operasional antara negara-negara anggota untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan pembajakan. Selain itu, ReCAAP menyelenggarakan pelatihan dan berbagai praktik terbaik dalam penegakan hukum maritim untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam mengatasi ancaman pembajakan. Meskipun bukan lembaga penegak hukum, perannya dalam menyediakan intelijen dan koordinasi keamanan maritim membantu negara-negara dan industri pelayaran dalam mengurangi risiko pembajakan di kawasan tersebut (Saraswati & Pinatih, 2020).

2.6 Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)

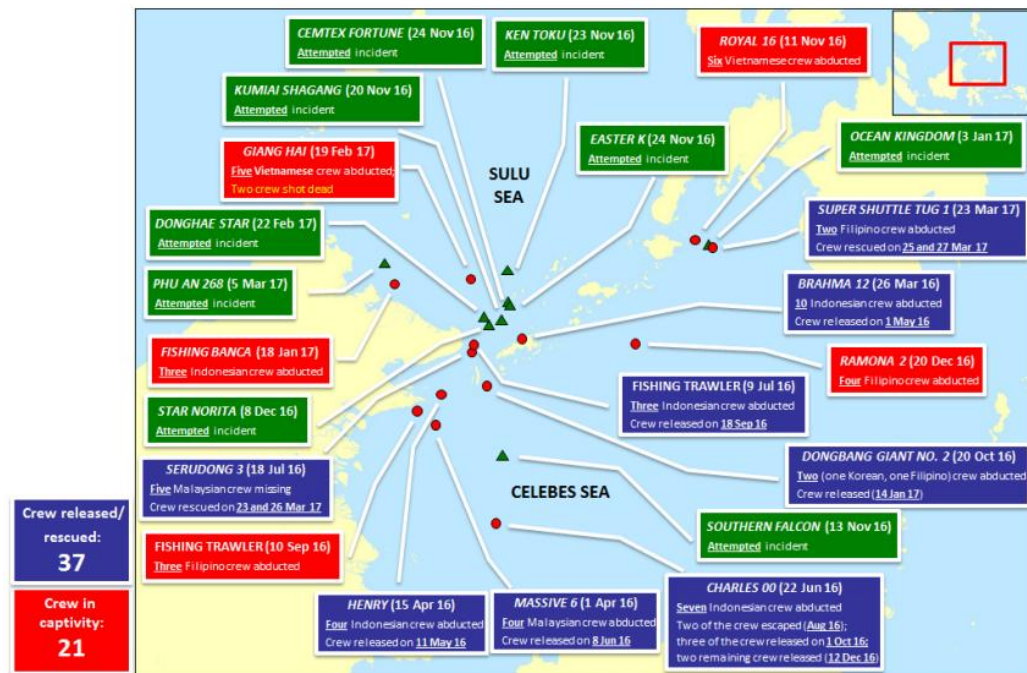
Berdasarkan kerangka institusional yang telah dijelaskan, termasuk peran ASEAN, UNCLOS 1982, dan ReCAAP, dapat dilihat bagaimana kerja sama regional difasilitasi melalui forum formal yang menyediakan dasar hukum, mekanisme koordinasi, dan pertukaran informasi untuk mengatasi tantangan keamanan maritim. Ketiga lembaga ini saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem kerja sama yang mendorong kolaborasi berbagai negara guna menanggapi ancaman pembajakan dan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Landasan tersebut melahirkan inisiatif *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), suatu bentuk kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang memadukan prinsip kelembagaan dengan tindakan nyata melalui patroli maritim terkoordinasi dan berbagi intelijen guna menjaga stabilitas dan keamanan di perairan Sulu dan Sulawesi.

2.6.1 Latar Belakang Pembentukan

Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) merupakan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama ini difokuskan pada upaya penanggulangan ancaman seperti pembajakan dan terorisme melalui patroli gabungan laut dan udara, koordinasi operasional, serta pembagian intelijen. Melalui TCA, negara-negara berupaya menjaga stabilitas keamanan maritim dan mencegah kegiatan kriminal lintas batas yang dapat mengganggu perdamaian di kawasan (Costa, 2023). TCA yang diresmikan pada 19 Juni 2017, diprakarsai oleh Indonesia dan ditetapkan melalui komitmen bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengatasi ancaman maritim yang meluas, khususnya pembajakan bersenjata di laut sekitar Sulu. Upaya regional ini bertujuan untuk memastikan keamanan maritim, menjaga citra kawasan, dan mencegah internasionalisasi masalah pembajakan dengan meningkatkan patroli, menetapkan titik fokus nasional, dan menyiapkan komunikasi *hotline*. Prakarsa ini mengikuti pendekatan berbasis konsensus gaya ASEAN yang diformalkan melalui *Joint Statement* (Chandra & Yudha, n.d.).

Gambar 2. 4 Insiden Penculikan dan Percobaan Penculikan Awak Kapal (2016-2017)



(ISC, 2017, p. 4)

Pembentukan TCA didorong oleh meningkatnya ancaman terorisme di Asia Tenggara, terutama dari kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang secara aktif melakukan penculikan untuk meminta tebusan dan menghasilkan jutaan dolar dari aktivitasnya. Daerah operasi ASG di Kepulauan Sulu menghadirkan tantangan geografis yang kompleks yang memungkinkan kelompok ini bergerak dan menghindari penangkapan oleh pasukan keamanan (Yaoren et al., 2021b). Insiden-insiden ini melibatkan penyanderaan awak kapal asing, termasuk warga negara Indonesia dan Malaysia, serta serangan terhadap kapal kargo dan resor wisata yang mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa kejahatan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh ASG pada tahun 2016 (Wiranto, 2017):

1. Kelompok militan menyandera 10 ABK WNI dari kapal TB. Brahma 12 dan TK. Anand 12 yang berbendera Indonesia pada tanggal 20 Maret 2016.
2. Tanggal 1 April 2016, kapal TB. Massive 6 berbendera Malaysia dibajak di perairan dekat Pulau Ligitan, Semporna, Sabah yang berbatasan dengan Filipina Selatan dan para ABK disandera.
3. 15 April 2016, perompakan terjadi terhadap TB. Henry dan TK. Christy berbendera Indonesia di perairan perbatasan Malaysia-Filipina saat kapal berlayar dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Indonesia.
4. Pada tanggal 18 Juni 2016, TB. Charles dan TK. Robby 152 berbendera Indonesia dibajak dalam perjalanan dari Jagayan Gracia Port di Filipina, menuju Samarinda dengan penyanderaan terhadap 7 ABK WNI.
5. 9 Juli 2016, sebanyak 3 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan LD/113/5/F berbendera Malaysia disandera di perairan Felda Sahabat, Malaysia.

Maraknya insiden penculikan dan pembajakan sepanjang tahun 2016 menunjukkan tingginya intensitas dan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh ASG terhadap keamanan maritim di perairan Sulu-Sulawesi. Rangkaian serangan ini menggarisbawahi urgensi pembentukan mekanisme kerja sama regional yang terkoordinasi untuk melindungi pelaut, jalur pelayaran, dan stabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Menyadari keterbatasan masing-masing negara dalam menghadapi ancaman ini, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu memprakarsai TCA sebagai bentuk kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan keamanan maritim dan memerangi terorisme. Perjanjian tersebut secara resmi ditetapkan pada tahun 2017, termasuk

pembentukan Pusat Komando Maritim bersama di Tarakan (Indonesia), Tawan (Malaysia), dan Bongao (Filipina) untuk memfasilitasi koordinasi patroli dan pertukaran intelijen (Yaoren et al., 2021b).

2.6.2 Kerangka Kerja Sama

TCA mengambil inspirasi dari model kerja sama regional *Malacca Strait Patrols* (MSP) di Selat Malaka dalam upaya meningkatkan keamanan maritim melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Seperti MSP yang menekankan patroli maritim bersama di Selat Malaka, TCA melaksanakan patroli trilateral di Laut Sulu dan Sulawesi untuk mencegah ancaman dan memperkuat kehadiran pasukan keamanan di wilayah yang rentan. Selain itu, kedua mekanisme tersebut mendorong berbagi pengetahuan dan informasi untuk memastikan respon cepat terhadap insiden maritim dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman keamanan. TCA juga berfokus pada peningkatan kapasitas kekuatan maritim melalui pelatihan, pembagian sumber daya, dan strategi operasional yang lebih efektif, sejalan dengan strategi MSP. Melalui pembangunan sistem terpadu untuk memantau dan menyelesaikan sengketa batas maritim, TCA mengikuti jejak MSP dalam memastikan stabilitas dan keamanan jangka panjang di perairan strategis (Arifin et al., 2018).

Tabel 2. 2 Perbedaan Mekanisme Kerja antara TCA dan MSP

Aspek	<i>Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)</i>	<i>Malacca Strait Patrols (MSP)</i>
Inisiatif	Didirikan pada 2017 untuk mengatasi kejahatan maritim di Laut Sulu-Sulawesi.	Didirikan pada 2004 untuk mengatasi pembajakan di Selat Malaka.
Negara Terlibat	Indonesia, Malaysia, dan Filipina.	Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Patroli Bersama	Pelaksanaan <i>Trilateral Maritime Patrol (TMP)</i> dan <i>Trilateral Air Patrol (TAP)</i> .	Pelaksanaan patroli laut terkoordinasi oleh angkatan laut ketiga negara.
Pusat Komando	<i>Maritime Command Center (MCC)</i> di Tarakan, Tawau, dan Bongao untuk koordinasi dan informasi.	Pusat komando berfungsi untuk memantau dan mengoordinasikan patroli.
Pertukaran Informasi	Berbagi intelijen dan data antar negara anggota melalui MCC dan ReCAAP.	Pertukaran informasi dilakukan secara langsung antara angkatan laut negara-negara yang terlibat.
Latihan Bersama	Kegiatan <i>Port Visit</i> untuk latihan gabungan dan diskusi informasi.	Latihan bersama dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan operasional.

Diolah oleh penulis dari (Arifin et al., 2018; Dirgantara et al., 2020)

Pengaturan TCA dan MSP memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan keamanan maritim, tetapi mekanismenya berbeda berdasarkan fokus operasional dan konteks historinya. TCA yang dibentuk pada tahun 2017 untuk mengatasi kekerasan maritim di Laut Sulu-Sulawesi, melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melaksanakan patroli maritim terkoordinasi dan pembagian intelijen melalui MCC di setiap negara. Keberhasilan TCA diukur dari penurunan signifikan dalam insiden pembajakan, sehingga meningkatkan keselamatan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Arifin et al., 2018). Sebaliknya, MSP dibentuk pada tahun 2004 untuk memerangi pembajakan di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sementara TCA dan MSP menekankan patroli gabungan dan pembagian intelijen, MSP beroperasi dalam kerja sama langsung dengan angkatan laut kedua negara, tanpa memerlukan MCC. Keberhasilan MSP juga tercermin dalam pengurangan pembajakan, peningkatan kepercayaan investor, dan keamanan dalam pelayaran internasional (Dirgantara et al., 2020).

Pelaksanaan kerja sama regional dalam memerangi pembajakan melalui TCA melibatkan langkah-langkah strategis terstruktur antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan *Joint Working Group* (JWG) pada tanggal 5 Mei 2016 yang menegaskan komitmen ketiga negara untuk patroli maritim guna mencegah maraknya pembajakan. Kemudian, disusun *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman perencanaan operasional untuk meningkatkan keamanan maritim di wilayah perbatasan dengan tetap

menghormati kedaulatan masing-masing negara. Untuk memperkuat koordinasi, *Maritime Command Center* (MCC) dibentuk di Laut Sulu bersamaan dengan peluncuran Patroli Maritim Trilateral Indomalphi pada 19 Juni 2017 di Tarakan, Indonesia. Selain itu, dilakukan patroli udara melalui *Indomalphi Trilateral Air Patrol* (TAP) pada 12 Oktober 2017 di Subang, Malaysia, serta kunjungan pelabuhan pertama pada 13-15 November 2017 di Tawi-Tawi, Filipina guna meningkatkan efektivitas pengamanan perairan (Rustam et al., 2022).

2.6.3 Pengaruh Interdependensi Kompleks

Interdependensi kompleks menggambarkan hubungan yang saling terkait antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam mengatasi ancaman keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi. Ketiga negara bekerja sama dalam aspek ekonomi, keamanan, dan politik melalui TCA untuk mengatasi pembajakan dan terorisme yang mengancam stabilitas regional. Selain itu, organisasi internasional seperti ASEAN dan perjanjian UNCLOS 1982 berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi dan memperkuat penegakan hukum laut. Pergeseran fokus dari politik tingkat tinggi ke politik tingkat rendah tercermin dalam upaya kolaboratif yang menekankan kerja sama ekonomi dan diplomasi daripada konfrontasi militer. Melalui peningkatan modernisasi dan integrasi regional, kerja sama ketiga negara semakin kuat dalam menjaga keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan (Jackson & Sorensen, 2013, pp. 107–109).

Kerja sama keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi mencakup patroli rutin dan terkoordinasi untuk meningkatkan keselamatan dan memastikan respon cepat terhadap ancaman melalui pusat komando maritim dan saluran komunikasi

yang efektif (Chandra & Yudha, n.d.). Interdependensi kompleks mendorong kebijakan keamanan yang lebih kooperatif dengan memprioritaskan diplomasi dan berbagi intelijen untuk mengurangi pembajakan dan penculikan. Stabilitas maritim menjadi prioritas karena memengaruhi kelangsungan perdagangan dan perlindungan ekosistem laut, sehingga semakin memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara (Aini, 2021). Selain itu, penerapan koridor transit dan konvoi laut berkontribusi pada rute navigasi yang aman menunjukkan peralihan dari pendekatan militeristik ke pendekatan yang lebih kolaboratif. Meningkatnya koordinasi dan kepercayaan antar negara, membuat kebijakan keamanan maritim berkembang menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap tantangan yang ada (Chandra & Yudha, n.d.).

Prioritas interdependensi kompleks dalam mengatasi ancaman adalah dengan memprioritaskan kekuatan lunak melalui diplomasi dan kerja sama multinasional, serta mengurangi ketergantungan pada solusi militer. Ketiga negara dalam kerja sama maritim dapat dengan cepat menanggapi insiden kriminal seperti penculikan dan pembajakan dengan patroli gabungan dan operasi penyelamatan terkoordinasi. Latihan gabungan rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapan operasional angkatan laut dan angkatan udara, guna memastikan respon yang lebih efektif terhadap ancaman maritim. Selain itu, hubungan ekonomi yang kuat berfungsi sebagai penyangga terhadap konflik, meningkatkan stabilitas regional dan mengurangi kemungkinan meningkatnya ketegangan. Pendekatan ini juga memperkuat dialog diplomatik antara negara-negara terkait yang memungkinkan

koordinasi kebijakan keamanan yang lebih efektif dan peningkatan kerja sama dalam mengatasi tantangan maritim (Pangestu, 2024, p. 55).

2.6.4 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Informasi

Ancaman ASG di Laut Sulu-Sulawesi telah mengganggu ekspor batu bara Indonesia ke Filipina dengan ekspor turun 23% pada tahun 2017 karena meningkatnya risiko pembajakan. Pemerintah Indonesia bahkan memberlakukan moratorium ekspor batu bara demi keselamatan warga negaranya yang berdampak negatif terhadap perekonomian Filipina yang sangat bergantung pada impor batu bara untuk pembangkit listrik. Gangguan perdagangan juga telah membuat hubungan bilateral kedua negara menjadi tegang, sehingga mendorong peningkatan kerja sama di bidang keamanan maritim untuk mengatasi ancaman pembajakan. Selain itu, dampak ekonomi terasa di tingkat lokal, ketika pasokan energi yang tidak menentu di Filipina dapat menyebabkan harga listrik yang lebih tinggi dan ketidakstabilan ekonomi (Puteri & Waluyo, 2021).

Sementara dalam kehidupan sosial, ancaman ASG meningkatkan ketakutan dan ketidakamanan di kalangan penduduk setempat, mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mental masyarakat sekitar. Kekerasan yang sedang berlangsung juga merusak kohesi sosial dengan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat dan memperburuk ketegangan budaya dan agama di wilayah tersebut. Selain itu, dampak ekonomi dari ancaman tersebut telah menyebabkan berkurangnya investasi dan kesempatan kerja, memperburuk kemiskinan, dan meningkatkan risiko radikalisme di kalangan anak muda. Struktur pemerintahan lokal juga terganggu karena pihak berwenang berjuang untuk menjaga ketertiban,

sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Dalam krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh pengungsian dan terbatasnya akses ke layanan dasar, upaya komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah sosial dan membangun perdamaian di wilayah tersebut (Chaidar et al., 2018).

Risiko keamanan serius bagi Indonesia juga timbul, terutama dengan seringnya penculikan WNI yang menimbulkan ketidakstabilan di sepanjang perbatasan laut. Dampaknya juga terasa di sektor ekonomi, yaitu gangguan pada perdagangan maritim dan rute pelayaran mengancam keselamatan kapal dan memperburuk ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Sebagai bentuk pengentasan ancaman ini, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina melalui patroli trilateral untuk meningkatkan keamanan maritim dan mencegah insiden penculikan di masa mendatang. Selain tindakan militer, strategi diplomasi dan negosiasi tetap menjadi kunci dalam menangani kasus penyanderaan yang menunjukkan pentingnya kerja sama regional dalam menjaga stabilitas. Di sisi lain, solusi jangka panjang melalui pembangunan sosial ekonomi dan kolaborasi budaya di Filipina selatan diharapkan dapat mengurangi akar yang mendukung keberadaan kelompok Abu Sayyaf (Pangaribuan et al., 2022).

Dinamika keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi kawasan ini, mulai dari aktivitas kelompok teroris seperti Abu Sayyaf, lemahnya pengawasan perairan, hingga buruknya kondisi geografis dan sosial ekonomi. Tingginya jumlah penculikan, pembajakan, dan kejahatan lintas batas tidak hanya mengancam keselamatan pelaut dan stabilitas

perdagangan, tetapi juga menuntut respon kolektif yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui pendekatan saling ketergantungan yang kompleks dan dukungan dari lembaga regional seperti ASEAN, UNCLOS 1982, dan ReCAAP, kerja sama antar negara semakin diperkuat untuk mengatasi tantangan ini. Seluruh dinamika tersebut menjadi dasar lahirnya *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), suatu kerja sama strategis antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya sebagai bentuk konkret respon regional terhadap ancaman pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi.